

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Pada teori keagensi (*agency theory*) dijelaskan bahwa pada sebuah perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi. Pihak-pihak tersebut adalah pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen perusahaan. Pemegang saham disebut sebagai Principal, sedangkan manajemen orang yang diberi kewenangan oleh pemegang saham untuk menjalankan perusahaan yang disebut (agen).

Agency theory memiliki bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan antara Principal dan agent. Pihak Principal termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat, sedangkan agent termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi (Hendriksen dan Brada,1992) dalam Ratna (2003).

Principal tidak memiliki informasi yang cukup terhadap kinerja agent, sedangkan agent memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidak seimbangan informasi yang dimiliki oleh Principal dan agent.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Eisenhardt (1998) dalam Haris (2004) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia, yaitu (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

2.2 Konservatisme Akuntansi

2.2.1 Definisi Konservatisme Akuntansi

Konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba dan aset cenderung rendah, serta angka-angka biaya dan utang cenderung tinggi. Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya, akibatnya, laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (*understatement*) (Juana, 2007, dalam Dinny 2013). Konservatisme sebagai reaksi kehati-hatian dalam menghadapi ketidak pastian yang melekat dalam perusahaan mencoba memastikan bahwa ketidak pastian dan risiko dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan. Selain merupakan konvensi penting dalam laporan keuangan, konservatisme mengimplikasikan kehati-hatian dalam mengakui dan mengukur pendapatan dan aktiva. Konsep konservatisme menyatakan bahwa dalam keadaan yang tidak pasti, manajer perusahaan akan menentukan pilihan perlakuan atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan akuntansi yang didasarkan pada keadaan, harapan, kejadian, atau hasil yang dianggap kurang menguntungkan (Dewi,2004).

Contoh konservatisme akuntansi adalah memilih antara kos atau harga pasar yang lebih rendah untuk akuntansi sediaan atau segera mengakui perubahan dalam estimasi kos jika diperkirakan menghasilkan kerugian di masa yang akan datang pada kontrak jangka panjang, tetapi tidak melakukan revisi jika menghasilkan peningkatan laba di masa yang akan datang, atau penurunan nilai fisik aset karena keuangan (*impairments*), tetapi tidak menaikkan untuk nilai aset lebih tinggi. Jika kompensasi manajerial terkait dengan laba dilaporkan, manajer mempunyai insentif tersembunyi dibalik setiap informasi laba dilaporkan. Konservatisme memainkan peran efisien ex ante dalam kontrakting antar pihak yang terlibat. Fleksibilitas yang diberikan oleh GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) memberikan keluasaan bagi manajemen dalam menentukan metode ataupun estimasi akuntansi yang dapat berpengaruh terhadap pencatatan akuntansi dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan.

2.2.2 Penerapan Konservatisme Akuntansi dalam Perusahaan

Konservatisme akuntansi salah satu prinsip yang dapat digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya. Penerapannya akan mengakibatkan angka-angka yang berbeda dalam laporan keuangan yang pada akhirnya akan menghasilkan laba yang konservatif. Apabila perusahaan memilih satu diantara dua teknik akuntansi yang ada, maka harus dipilih alternative yang ke 19 kurang menguntungkan bagi ekuitas pemegang saham.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik yang dipilih adalah teknik yang menghasilkan nilai aset dan pendapatan yang rendah atau yang menghasilkan nilai utang dan biaya yang tinggi (Chairiri dan Ghozali,2003).

Dengan demikian apabila terdapat kondisi yang kemungkinan menimbulkan laba pendapatan atau aset, maka laba, pendapatan atau aset tidak dapat langsung diakui sampai kondisi tersebut benar-benar telah terjadi.

Watts (2003) menguraikan ada empat hal yang menjadi penjabar tentang pilihan perusahaan dan menerapkan konservatisme akuntansi:

a. *Contracting Explanation*

Konservatisme merupakan upaya untuk membentuk mekanisme kontak yang efisien antara perusahaan dan berbagai pihak eksternal.

b. *Litigation* terhadap perusahaan

Risiko litigasi berkaitan dengan posisi kreditor dan investor sebagai pihak eksternal. Investor dan kreditor adalah pihak yang memperoleh perlindungan hukum.

c. *Taxation*

Penerapan akuntansi konservatif dilakukan dalam upaya memperkecil pajak penghasilan perusahaan. Manajemen perusahaan dapat memilih metode yang cenderung konservatif dalam rangka menekan biaya pajak sepanjang diperbolehkan dalam SAK yang berlaku.

d. *Regulation*

Regulator membuat insentif bagi pelaporan keuangan agar laporan keuangan secara konservatif. Negara-negara dengan regulasi tinggi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki tingka konservatisme yang lebih tinggi dari pada Negara-negara dengan tingkat regulasi rendah manajemen diberi beberapa pilihan untuk menyelenggarakan akuntansi konservatif.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) SAK menyebutkan ada beberapa metode yang menerapkan prinsip konservatisme (Deviyanti,2012):

1. PSAK No. 14 (Revisi 2008) yang mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan. Perhitungan biaya persediaan dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) adalah perhitungan yang dapat menghasilkan laba lebih besar dari pada metode *Last IN First Out* (LIFO) dan rata-rata tertimbang. Hal ini disebabkan biaya persediaan yang besar menyebabkan harga pokok penjualan yang kecil, sehingga laba yang dihasilkan besar.
2. PSAK No.17 (1994) tentang akuntansi penyusutan yang diganti oleh PSAK No.16 (Revisi 2007) mengenai aset tetap dan pilihan dalam menghitung biaya penyusutannya. Metode yang dapat digunakan antara lain metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*disminishing balanching method*), dan metode jumlah (*sum of the unit method*). Apabila memiliki periode yang semakin pendek, maka prinsip akuntansi yang diterapkan akan semakin konservatif. Hal tersebut dikarenakan biaya penyusutan menjadi lebih kecil. Metode penyusutan saldo menurun (*disminishing balanching method*) merupakan metode yang lebih konservatif jika dibandingkan dengan metode garis lurus dan metode jumlah unit.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. PSAK No.19 (Revisi 2009) untuk menentukan perlakuan akuntansi bagi aset tidak berwujud yang tidak diatur secara khusus pada standar lainnya. Pernyataan ini juga mengatur cara mengukur jumlah tercatat dari aset tidak berwujud dan menentukan pengungkapan yang harus dilakukan bagi aset tidak berwujud. Metode amortisasi untuk mengalokasikan jumlah aset tidak berwujud yang serupa dengan penyusutan pada aset tetap meliputi:
 - a. Metode garis lurus
 - b. Metode saldo menurun berganda
 - c. Metode jumlah unit produksi

Jika periode amortisasi aset tidak berwujud semakin pendek maka akuntansi yang diterapkan juga semakin konservatif, sebaliknya bila periode amortisasi semakin panjang maka semakin tidak konservatif (Dewi,2004). PSAK No.20 tentang biaya riset dan pengembangan. Apabila biaya riset dan pengembangan. Apabila biaya riset dan pengembangan diakui sebagai beban dari pada sebagai beban, maka laba yang dihasilkan didalam laporan keuangan menjadi kecil. Sebaliknya, biaya yang terjadi diakui sebagai aset, maka laba yang dihasilkan besar dan akuntansi menjadi tidak konservatif.

2.2.3 Laba Akuntansi Versus Laba Fiskal

Terdapat kesamaan dalam pengukuran laba akuntansi dan laba fiskal, yaitu metode akuntansi akrual (Guether et.al 1997) meskipun terdapat beberapa butir spesifik dari pendapatan dan biaya harus mengikuti peraturan akuntansi fiskal yang berbeda dengan peraturan akuntansi keuangan, misalnya: pembebanan biaya depresiasi aset tetap. Kaitan antara pelaporan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak dan komersial dapat menyebabkan konservatisme dalam pelaporan keuangan. Pengakuan asimetrik keuntungan dan kerugian dalam konservatisme akuntansi membuat manajer perusahaan profitable mengurangi nilai kini pajaknya dan meningkatkan nilai perusahaan. Menunda pengakuan dari penghasilan dan mempercepat pengakuan dari biaya dapat menunda pembayaran pajaknya (Watts, 2003).

Setelah diwajibkan menggunakan basis akrual, perusahaan yang sebelumnya menggunakan basis kas menunda laba untuk tujuan laporan keuangan. Sehingga dengan basis akrual, kesesuaian antara laba akuntansi dan laba fiskal mengarahkan perusahaan merubah perilaku akrualnya. Dengan menunda laba, mereka menurunkan laba fiskalnya dan menghemat pajak.

2.3 Manajemen Laba

2.3.1 Definisi Manajemen Laba

Setiawati dan Na'im (2000) dalam Wisnumurti (2010) menyatakan bahwa manajemen laba merupakan campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Manajemen laba sendiri dapat mengakibatkan berkurangnya kredibilitas laporan keuangan, menambah biaya dalam laporan keuangan mepercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa. Manajemen laba sebagai suatu proses mengambil langkah yang disengaja dalam batas prinsip akuntansi yang berterima umum baik didalam maupun diluar batas *Generally Accepted Accounting Principles* (GGAP). Menurut Sugiri (1998) dalam Ardilla (2012), earning management dibagi kedalam dua definisi, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Definisi Sempit.

Manajemen laba dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Manajemen laba dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai perilaku manajer bermain dengan komponen discretionary accruals dalam menentukan besarnya laba.

2. Definisi Luas.

Manajemen laba merupakan tindakan untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit usaha dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut.

2.3.2 Pola Manajer Dalam Melakukan Manajemen Laba

Menurut Scott (2008:383), berbagai pola yang sering dilakukan manajer dalam earning management adalah:

1. *Taking a bath*

Taking a bath terjadi ketika perusahaan mengadakan reorganisasi, misalnya pengangkatan CEO baru. Taking a bath mengakui adanya biaya pada periode yang akan datang sebagai kerugian pada periode berjalan.

2. *Income minimization.*

Income minimization mirip dengan “taking a bath” tetapi lebih ekstrim yaitu dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba yang lebih tinggi dengan mempercepat penghapusan aktiva tetap dan aktiva tak berwujud, dan mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Income maximization*

Income maximization merupakan cara dari manajemen untuk memaksimalkan laba yang dilaporkan, agar bonus yang didapat lebih besar. Income maximization dilakukan ketika perusahaan mengalami penurunan laba.

4. *Income smoothing*

Income smoothing dilakukan manajer dengan meratakan laba perusahaan untuk tujuan pelaporan terhadap pihak yang berkepentingan, terutama investor, karena investor cenderung lebih menyukai laba yang relative stabil dari suatu periode ke periode berikutnya.

2.3.3 Motivasi Manajemen Laba

Scott (2000:302) dalam Rahmawati dkk. (2006) mengemukakan beberapa terjadinya motivasi manajemen laba, yaitu:

a. Motivasi bonus

Manajer akan berusaha mengatur laba bersih yang dilaporkan dengan tujuan memaksimalkan jumlah bonus yang akan didapatnya.

b. Motivasi kontrak

Manajer akan menaikkan laba bersih untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami kesalahan teknik. Motivasi kontrak ini biasanya berhubungan dengan kontrak jangka panjang.

c. Motivasi politik.

Perusahaan besar biasanya menurunkan labanya guna mengurangi biaya politik dan pengawasan dari pemerintah, memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Motivasi pajak.

Merupakan salah satu alasan utama mengapa manajer melakukan manajemen laba, yaitu dengan mengurangi laba bersih guna meminimalisir pembayaran pajaknya.

e. Pergantian CEO (*Chief Executive Officer*)

CEO yang mendekati akhir masa jabatannya akan meningkatkan bonusnya dengan Income Maximization.

f. Penawaran saham perdana (IPO)

Perusahaan yang baru kali menawarkan sahamnya dipasar modal belum mempunyai harga pasar, sehingga memiliki masalah bagaimana menetapkan nilai saham yang akan ditawarkan. Manajemen melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas sahamnya, dengan harapan dapat memberikan sinyal positif kepada investor.

2.3.4 Teknik-teknik Manajemen Laba

Teknik dan pola manajemen laba menurut Setiawati dan Na'im (2000) mengatakan bahwa manajemen laba dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu:

1. Memanfaatkan peluang untuk estimasi akuntansi
2. Mengubah metode akuntansi
3. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Teknik dan pola manajemen laba di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi. Manajemen dapat mempengaruhi laba melalui perkiraan terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak terwujud, estimasi biaya garansi dan lain-lain.
2. Mengubah metode akuntansi. Manajemen laba dapat mengubah metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi. Contohnya mengubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahu ke metode garis lurus.
3. Menggeser periode biaya atau pendapatan. Manajemen laba dapat dilakukan dengan menggeser periode atau pendapatan. Contohnya mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva yang sudah tidak dipakai.

2.4 Insentif Pajak

2.4.1 Definisi Insentif Pajak

Subagya dan Octavia (2010) menyatakan bahwa insentif pajak mengimplikasikan bahwa perusahaan akan memilih untuk menurunkan laba sebagai respon atas penurunan tarif pajak. Menurut T. Hani Handoko (2002) dalam Tierya (2012), insentif merupakan perangsang yang ditawarkan kepada karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai atau lebih tinggi dari standar-standar yang telah ditetapkan. Yang berarti, insentif pajak adalah suatu perangsang yang ditawarkan kepada wajib pajak, dengan harapan wajib pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ada bermacam-macam, misalnya pemotongan pajak (tax allowed) dan pembebasan pajak (tax holliday).

2.4.2 Komponen Insentif Pajak

Menurut Suandy, 2003 dalam Widyawanti, 2014 ada empat komponen insentif pajak yaitu: pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak, penangguhan pajak. Namun dalam penelitian Yin dan Cheng (2004) dan Yulianti (2005) proksi yang digunakan untuk mengukur insentif pajak adalah perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan

a. Perencanaan Pajak

Yin dan Cheng (2004) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik, akan mendapatkan keuntungan dari tax shields dan akan dapat meminimalisir pembayaran pajaknya.

b. Kewajiban Pajak Tangguhan

Yulianti (2005) menyatakan bahwa kewajiban (aset) pajak tangguhan meningkat ketika perusahaan mempercepat pengakuan pendapatan atau menangguhkan pengakuan beban (mempercepat beban atau mengganggu pendapatan) untuk kepentingan akuntansi dibandingkan dengan kepentingan perpajakan perusahaan tersebut. Dengan pola seperti ini, maka perusahaan tersebut akan melaporkan laba akuntansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan laba menurut perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Insentif Non Pajak

2.5.1 Definisi Insentif Non Pajak

Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh insentif pajak namun juga dipengaruhi oleh insentif no pajak.

Insentif non pajak, adalah insentif yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri guna meningkatkan produktifitas karyawan dan mempertahankan karyawan yang berprestasi agar tetap berada dalam perusahaan.

2.5.2 Komponen Insentif Non Pajak

Yin dan Cheng (2004) menyebutkan dalam penelitiannya, bahwa insentif non pajak dapat diukur dengan *earnings pressure*, tingkat hutang dan ukuran perusahaan.

a. *Earning pressure*

Earning pressure didefinisikan sebagai tindakan untuk melakukan penurunan akrual yang bersifat menurunkan laba sehingga pajak yang akan dibayarkan menjadi kecil.

b. Tingkat utang

Tingkat utang adalah besar kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu lalu dan harus dibayar dengan kas, barang dan jasa waktu yang akan datang.

c. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala pengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan biasanya laba yang dihasilkan juga akan semakin besar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Tarif Pajak Penghasilan Untuk Perusahaan Yang Terdaftar Di LQ 45 Dan Minimal 40% Saham Disetornya Diperdagangkan Di Bursa Efek Indonesia

Menurut peraturan menteri keuangan PMK-238/PMK.03/2008, ada 5 (lima) hal yang diatur dalam penurunan tarif, yaitu:

1. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dapat memperoleh potongan tarif pajak penghasilan sebesar 5% lebih rendah tarif tunggal tertinggi pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang PPh.
2. Penurunan tarif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud di atas diberikan kepada wajib pajak apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% dan/atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak.
3. Masing-masing pihak sebagaimana dimaksud di atas hanya boleh memiliki saham kurang 5% dari keseluruhan saham yang disetor
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi oleh wajib pajak badan dalam waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak.
5. Waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud di atas adalah 183 hari

2.7 Kajian Pajak dalam Islam

Dalam istilah bahasa arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah atau bisa juga disebut Al-Maks, yang artinya adalah “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak” (Lihat Lisanul Arab IX/217-218 dan XIII/160, dan Shahih Muslim dengan syarahnya oleh Imam Nawawi XI/202.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut imam al-Ghazalidan imam al-Juwaini, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintah muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang di pandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal.”(lihat Syifa’ulGhalil hal.234, dan Ghiyats al-Umam Min Iltiyats Azh-Zhulminhal, 275).

Adapun pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Disana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau Adh-Dharibah diantaranya adalah:

- a. Al-Jizyah (Upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan islam).
- b. Al-Kharaj (pajak bumi yang dimiliki oleh Negara islam).
- c. Al-‘Usyur (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara islam) adapun ayat yang berkaitan dengan pajak:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka dia antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS An-Nisa:29).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat tersebut diatas Allah melarang hambanya saking memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak sesuai aturan. Dalam sebuah hadits yang shahih Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمَا لَمْ يَمْسُكْ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ

Artinya: “Tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya”

Adapun dalil secara khusus yang mengancam apabila pajak tidak dipungut dengan benar diantaranya bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِفِ النَّارُ

Artinya: ”Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab)di neraka” [HR Ahmad

4/109, Abu Dawud kitab Al-imarah:7]

2.8 Penelitian Terdahulu

Ringkasan hasil penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Table 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Siti Munfiah Hidayati dan Zulaikha (2004)	Analisis Perilaku Earning Management: Motivasi Minimalisasi Income Tax	Earning Management: Motivasi Minimalisasi Income Tax	Tidak berhasil membuktikan adanya respon perusahaan untuk melakukan manajemen laba.
2.	Subagyo dan Oktavia (2010)	Manajemen Laba Sebagai Respon Atas Perubahan	Manajemen Laba, Perubahan	Perusahaan manufaktur yang melakukan manajemen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Tarif Pajak Penghasilan Badan Di Indonesia.	Tarif Pajak Penghasilan Badan Di Indonesia.	laba dalam rangka merespon perubahan tarif pajak bada di Indonesia adalah <i>profitfirm</i> , sedangkan <i>loss firm</i> tidak adanya merespon perubahan tarif pajak badan dengan melakukan menajeen laba. Ditemukan pula but bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh <i>profit firm</i> dipegaruhi oleh insentif non pajak, sedangkan <i>loss firm</i> hanya dipengaruhi oleh insentif non pajak saja.
3.	Wulandari, dkk (2004)	Indikasi manajemen laba menjelang UU perpajakan 2000 padaperusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	Manajemen laba, UU perpajakan 2000	Membuktikan bahwa perusahaan masih melakukan praktek manajemen laba setelah perubahan UU perpajakan 2000. Tingkat discretionary accrual setelah adanya perubahan UU perpajakan 2000 lebih tinggi dibandingkan sebelum adanya perubahan
4.	Windra septian wicaksono (2012)	Praktik manajemen laba perusahaan dalam menanggapi penurunan tarif pajak sesuai UU No. 36 tahun 2008	Manajemen laba, Tarif pajak sesuai UU No. 36 tahun 2008	Bukan hanya perusahaan yang memperoleh laba (<i>profi firm</i>) saja yang melakukan manajemen laba dalam menanggapi penurunan tarif pajak badan, melainkan juga yang mengalami kerugian (<i>loss firm</i>)
5.	Dinny prastiwi	Pengaruh faktor-faktor	Konservatisme akuntansi,	Membuktikan bahwa konservatisme

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	brilianti (2013)	konservatisme akuntansi dalam perpajakan.	perpajakan	akuntansi menyebabkan laba akuntansi bias ke bawah. Sehingga perusahaan mencoba untuk meminimalkan pembayaran pajaknya.
6.	Denny prastiwi briliandi (2013)	Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, <i>Leverage</i> dan komite audit terhadap konservatisme akuntansi	Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, <i>Leverage</i> , komite audit konservatisme akuntansi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, <i>Leverage</i> dan komite audit secara bersama-sama memengaruhi konservatisme akuntansi sebesar 8,9%.
7.	Wenty Anggraeni (2011)	Analisis tingkat Discretionary Accrual Sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan badan 2008	Discretionary Accrual sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan badan 2008	Tidak dapat menemukan adanya manajemen laba yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan laba kena pajaknya.
8.	Ivan Rizky Tiearya (2012)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba Sebagai Respon atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan 2008 di Indonesia	Variabel independen dan variable independen	Penelitian ini belum dapat yang di jadikan pertimbangan investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.

Sumber: Diringkas dari berbagai jurnal.

2.9 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dibuat kaitan antara konservatisme akuntansi, insentif pajak yaitu perencanaan pajak, kewajiban pajak tangguhan dan insentif non pajak yaitu *earning pressure*, tingkat hutang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

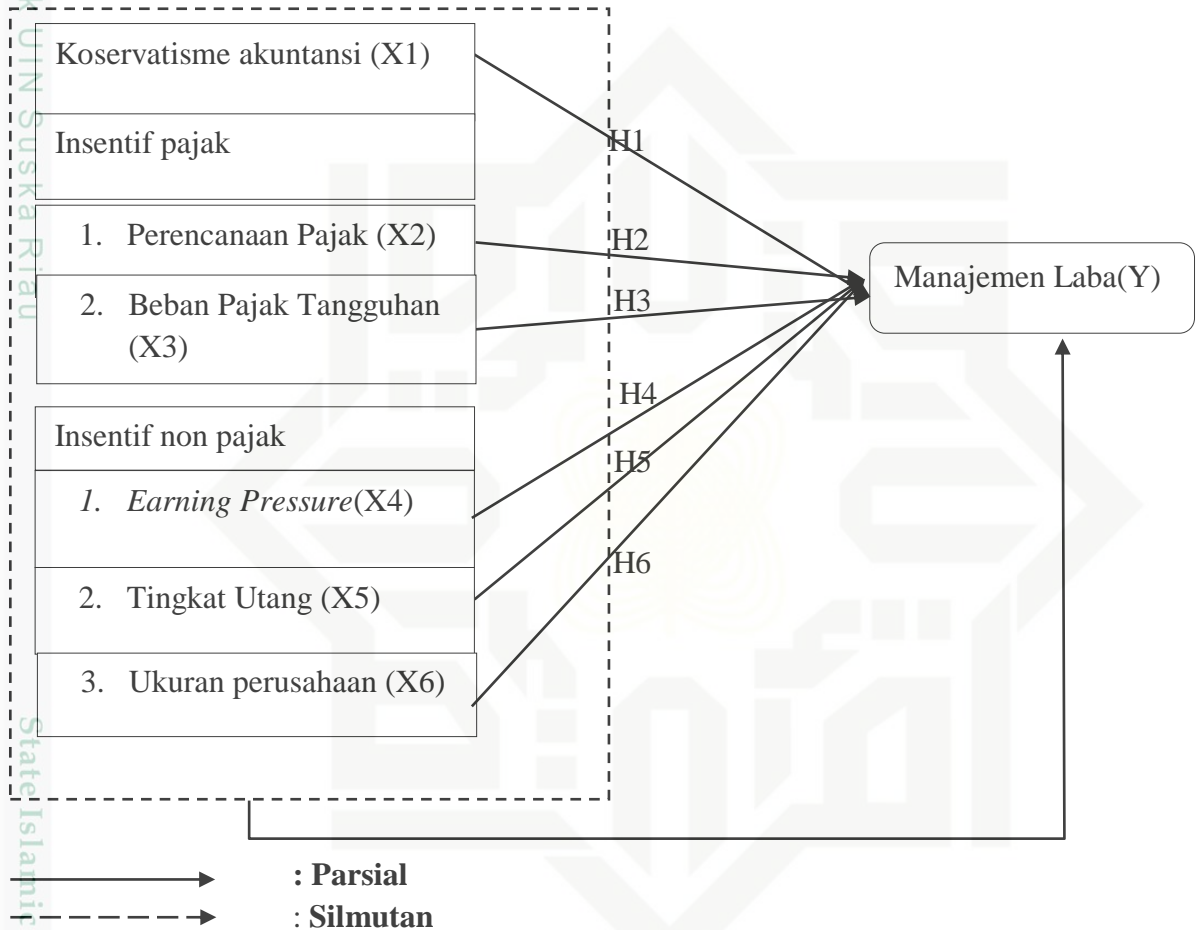
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan, ukuran perusahaan, persentase saham disetor dengan kerangka pemikiran sebagai berikut.

**Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran**



2.10 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan tentang sesuatu yang untuk sementara waktu dianggap benar. Selain itu juga hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang akan di teliti sebagai jawaban sementara dari suatu masalah. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10.1 Konservatisme Akuntansi Terhadap Manajemen Laba

Konservatisme akuntansi menurut Penman dan Zhang (2002) dalam Dinny (2013) dapat menurunkan kualitas labanya, yaitu ketika perusahaan mempraktikkan konservatisme kemudian menurunkan jumlah investasinya, maka perusahaan tersebut melakukan realisasi cadangan. Hal tersebut bukan merupakan indikator yang baik untuk laba mendatang, yang mempraktikkan konservatisme dan mengalami pertumbuhan dalam investasi akan menurunkan laba dilaporkan dan menciptakan cadangan. Dalam kaitan pajak penghasilan, hal ini diduga dapat mengarahkan terjadinya sengketa karena menyebabkan semakin besar perbedaan perhitungan pajak penghasilan menurut perusahaan dan perhitungan menurut fiskal hal ini menimbulkan inisiatif manajer perusahaan untuk memanipulasi lab perusahaan. Manajemen laba adalah campur Tangan proses pelaporan keuangan eksternal yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara memaksimalkan atau meminimalkan laba sesuai dengan keinginan manajer.

H1 : konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap manajemen laba

2.10.2 Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Perilaku manajemen tidak hanya dikaitkan dengan perubahan tarif pajak, tetapi juga di pengaruhi oleh unsur lain, yaitu insentif pajak dan non pajak. Yin dan Cheng (2004) dalam Wijaya dan Martani (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik, akan mendapatkan keuntungan dari *tax shields* dan akan dapat meminimalisir pembayaran pajaknya. Dalam hal ini, regulasi pemerintah berkaitan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal perpajakan. Apabila perusahaan besar menurunkan labanya, maka pajak perusahaan tersebut juga menjadi turun (kecil).

H2: perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba

2.10.3 Kewajiban Pajak Tangguhan Bersih Terhadap Manajemen Laba

Yulianti (2005) dalam Martani dan Wijaya (2011) menyatakan bahwa kewajiban (asset) pajak tangguhan meningkat ketika perusahaan mempercepat pengakuan pendapatan atau menangguhkan pengakuan beban (mempercepat beban atau menangguhkan pendapatan) untuk kepentingan akuntansi dibandingkan dengan kepentingan perpajakan perusahaan tersebut. Dengan pola seperti ini, maka perusahaan tersebut akan melaporkan laba akuntansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan laba menurut perpajakan, sehingga akan meningkatkan kewajiban pajak tangguhan bersih perusahaan tersebut, begitu pula sebaliknya (Wijaya dan Martani 2011).

H3 : Kewajiban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.10.4 *Earning pressure* Terhadap Manajemen Laba

Wijaya dan Martani (2011) menyatakan bahwa *Earning Pressure* merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan guna menurunkan labanya. Jika laba pada tahun berjalan telah sama dengan tahun lalu, atau melebihi laba tahun lalu, maka perusahaan tertarik untuk melakukan *income smooting*, karena investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

H4 : *Earning pressure* berpengaruh terhadap manajemen laba

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10.5 Tingkat Hutang Perusahaan Terhadap Manajemen Laba

Tingkat hutang berbanding terbalik dengan laba. Apabila hutang perusahaan semakin besar maka laba perusahaan akan semakin kecil, begitu juga sebaliknya, jika hutang perusahaan kecil, maka laba perusahaan semakin besar. Jika dikaitkan dengan dunia perpajakan, maka semakin besar labanya perusahaan, berarti semakin besar pula pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dengan meninjau hal tersebut, perusahaan sebisa mungkin memperkecil labanya atau memanipulasi laba agar pembayaran kewajiban pajaknya juga kecil. Manipulasi laba ini dapat dilakukan dengan menaikkan tingkat hutang (Tierya, 2012).

H5 : Tingkat Hutang Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Laba

2.10.6 Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Wijaya dan Martani (2012) mengatakan bahwa perusahaan yang lebih besar akan lebih sensitif terhadap biaya politik dan dengan begitu akan lebih mungkin untuk menggunakan metode akuntansi yang mengurangi laba bersih laporan keuangan. Ekspektasi bahwa perusahaan besar akan lebih mungkin untuk mengurangi laba laporan keuangan dan menunda laba kena pajak sebagai respon terhadap penurunan tarif pajak . salah satu regulasi yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan dunia perpajakan. UU mengatur jumlah pajak yang akan ditarik dari perusahaan berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Dengan kata lain, besar kecilnya pajak yang akan ditarik oleh pemerintah sangat tergantung pada besar kecilnya laba yang dicapai perusahaan.

H6 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba